KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

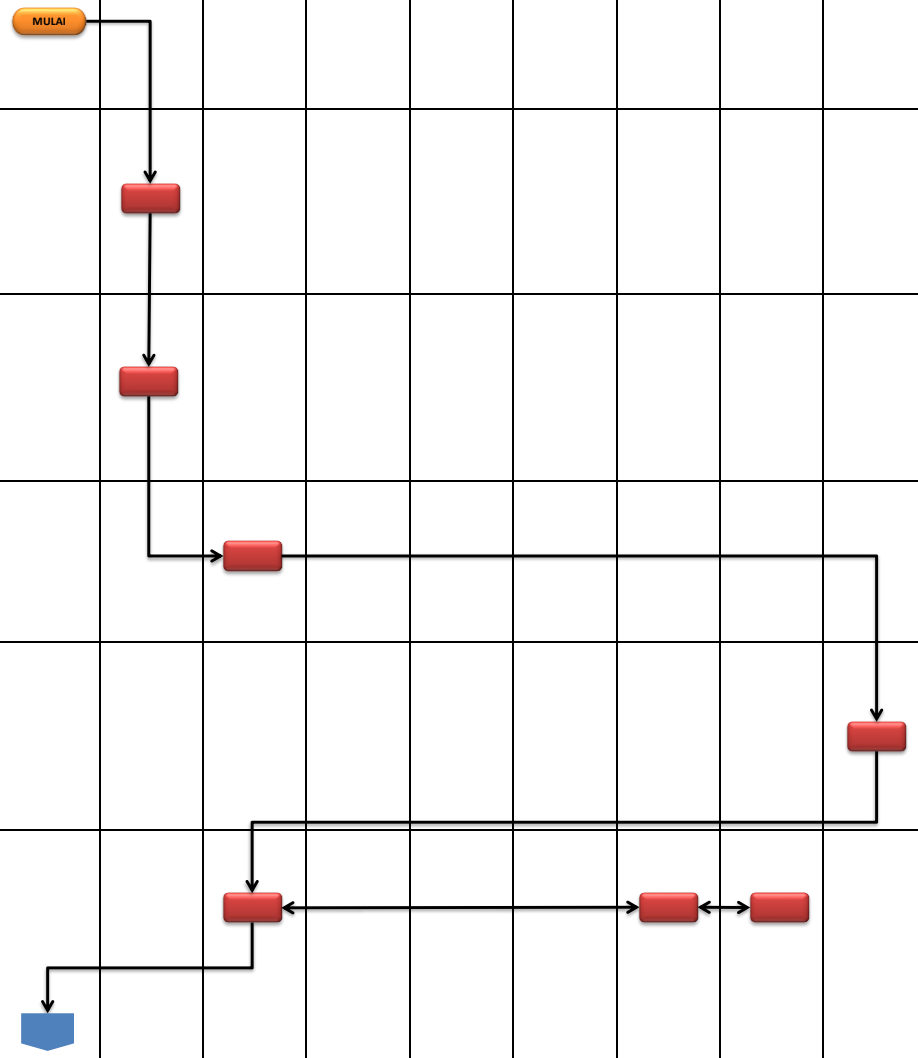
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-154
TANGGAL PEMBUATAN	30 SEPTEMBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	16 OKTOBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN**

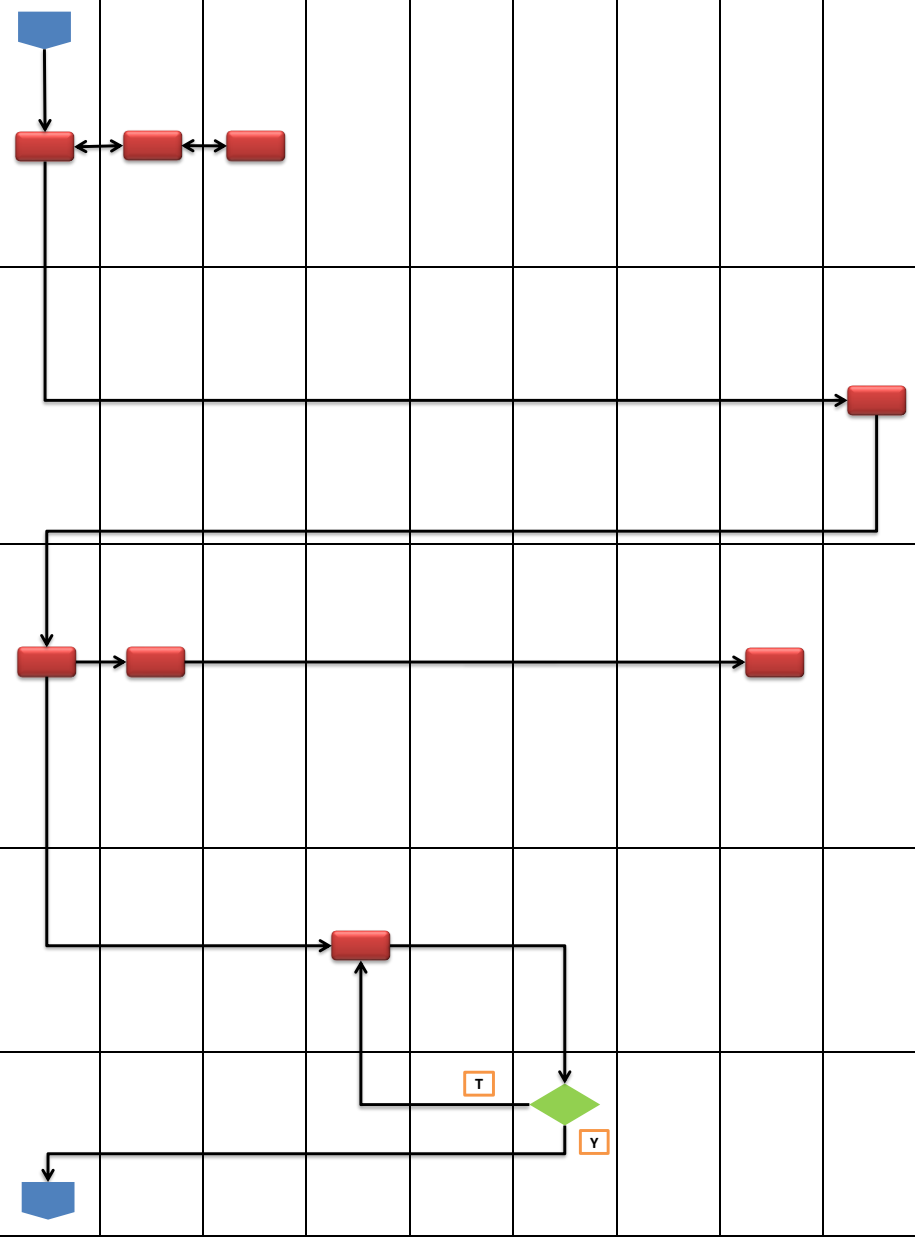
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2 Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 7 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 8 Peraturan Menteri Hukum terkait tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum terbaru;	1. Memiliki pengetahuan terkait prosedur evaluasi kelembagaan 2. Memiliki pengetahuan terkait tugas dan fungsi organisasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum	1. Dokumen RPJMN dan Resntra Kementerian Hukum; 2. ORTA Kementerian Hukum 3. Komputer / Laptop / Printer; 4. Jaringan koneksi internet; 5. Alat tulis.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses penataan kelembagaan pada organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

No	Kegiatan	PELAKSANA									Mutu Baku			Keterangan
		KARO RENO	SES UKE I	KABAG ORTALA & TU	SEKJEN	MENTERI HUKUM	KEMEN PANRB	BIRO HUKERMA	DITJEN PP	JF / PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta daftar invetarisasi masalah terkait rencana penataan kelembagaan Unit Eselon I yang diturunkan ke Kantor Wilayah	MULAI									Hasil review summary rencana penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Minggu	Surat permintaan usulan penataan kelembagaan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	-
2	Menyusun daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah sesuai kebutuhan layanan Unit Eselon I										Surat permintaan usulan penataan kelembagaan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	3 Minggu	Daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah	-
3	Menyampaikan usulan penataan kelembagaan melalui daftar inventarisasi masalah pada tugas fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah										Daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah	1 Minggu	Naskah urgensi penataan kelembagaan Kantor Wilayah	-
4	Mendisposisi daftar inventarisasi masalah Unit Kantor Wilayah untuk ditelaah dan dianalisis kepada bawahan										Naskah urgensi penataan kelembagaan Kantor Wilayah	2 Hari	Usulan penataan organisasi Kantor Wilayah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi	-
5	Melakukan telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan Kantor Wilayah dari setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah										Usulan penataan organisasi Kantor Wilayah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi	1 Bulan	Dokumen hasil telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	-
6	Menyusun rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah kedalam dokumen Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum beserta naskah urgensinya										Dokumen hasil telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	2 Minggu	- Rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah	-

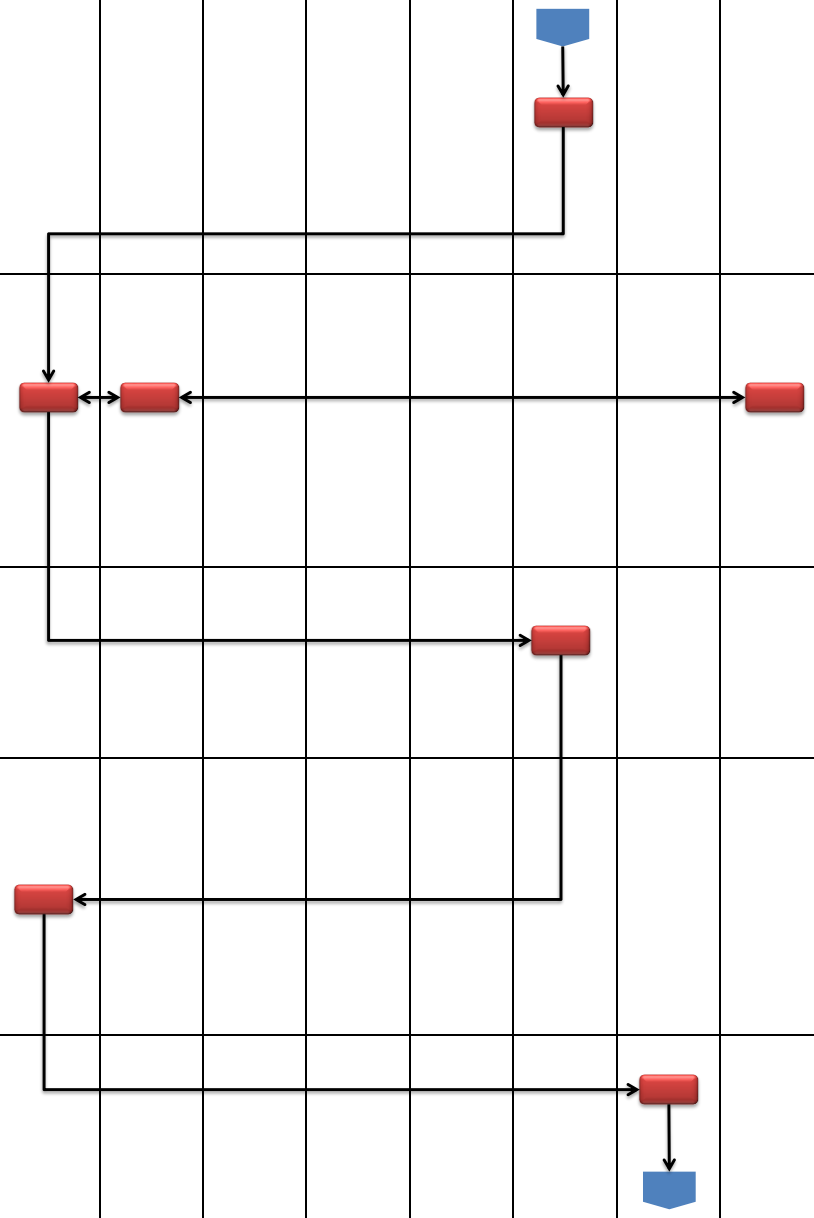


No	Kegiatan	PELAKSANA									Mutu Baku			Keterangan
		KARO RENO	SES UKE I	KABAG ORTALA & TU	SEKJEN	MENTERI HUKUM	KEMEN PANRB	BIRO HUKERMA	DITJEN PP	JF / PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan rapat pembahasan dengan Unit Eselon I terhadap hasil kajian yang dilakukan Biro Perencanaan dan Organisasi terhadap usulan penataan kelembagaan Kantor Wilayah berdasaran daftar inventarisasi masalah setiap Unit Eselon I										Rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah	2 Minggu	Dokumen rancangan penataan kelembagaan Kantor Wilayah sesuai hasil bahas dengan setiap Unit Eselon I	-
8	Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan terkait penataan kelembagaan Kantor Wilayah dengan memperbaiki dan menyempurnakan tugas fungsi berdasarkan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I										Dokumen rancangan penataan kelembagaan Kantor Wilayah sesuai hasil bahas dengan setiap Unit Eselon I	1 Minggu	Dokumen rancangan penataan kelembagaan Kantor Wilayah yang telah disesuaikan dengan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I	-
9	Pembahasan kembali beberapa rapat lanjutan dengan Unit Eselon I untuk finalisasi rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah dalam bentuk dokumen Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian dan naskah urgensinya										Dokumen rancangan penataan kelembagaan Kantor Wilayah yang telah disesuaikan dengan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I	1 Bulan	Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	-
10	Mengundang KemenPANRB dalam rapat pembahasan review rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah yang telah disepakati setiap Unit Eselon I										Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	1 Minggu	Review terhadap rumusan Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	-
11	KemenPANRB memberikan arahan dan koreksi pada rapat review terhadap rancangan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum										Review terhadap rumusan Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	1 Minggu	Draft rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan KemenPANRB yang telah dikoreksi dan disempurnakan	-



No	Kegiatan	PELAKSANA									Mutu Baku			Keterangan
		KARO RENO	SES UKE I	KABAG ORTALA & TU	SEKJEN	MENTERI HUKUM	KEMEN PANRB	BIRO HUKERMA	DITJEN PP	JF / PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Rapat Pembahasan dengan Unit Eselon I sebagai tindaklanjut hasil review dan masukan dari KemenPANRB										Draft rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan KemenPANRB yang telah dikoreksi dan disempurnakan	1 Minggu	Draft final rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil masukan dan koreksi dari KemenPANRB	-
13	Rapat finalisasi yang melibatkan Pimti Madya Unit Eselon I untuk menetapkan kerangka kelembagaan Kantor Wilayah yang akan diajukan ke KemenPANRB										Draft final rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil masukan dan koreksi dari KemenPANRB	1 Minggu	Draft final rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang diusulkan ke KemenPANRB	-
14	Mengajukan konsep Surat Menteri Hukum tentang penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum										Draft final rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang diusulkan ke KemenPANRB	1 Minggu	- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-
15	KemenPANRB mempelajari usulan penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum										- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	3 Bulan	Hasil telaah dan kajian internal Tim Kelembagaan KemenPANRB	-
16	KemenPANRB mengundang kedalam sejumlah rapat sebagai tindaklanjut usulan penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum hingga diperoleh kesepakatan bersama										- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	2 Minggu	Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari KemenPANRB	-

No	Kegiatan	PELAKSANA									Mutu Baku			Keterangan
		KARO RENO	SES UKE I	KABAG ORTALA & TU	SEKJEN	MENTERI HUKUM	KEMEN PANRB	BIRO HUKERMA	DITJEN PP	JF / PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	KemenPANRB melakukan rangkaian tahapan proses pembentukan regulasi, termasuk mengusulkan proses harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada Ditjen PP										Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari KemenPANRB	2 Minggu	Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari KemenPANRB	-
18	Mengundang pihak pemrakarsa dan stakeholder dalam rapat pembahasan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum hingga selesai dan disepakati bersama										Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari KemenPANRB	1 Minggu	Surat Tanda Selesai Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-
19	KemenPANRB menetapkan kerangka penataan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum										Surat Tanda Selesai Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Bulan	Surat Menteri PANRB terkait Persetujuan Penataan Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-
20	Menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama untuk ditetapkan										- Surat Menteri PANRB terkait Persetujuan Penataan Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum - Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Minggu	Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja hal permohonan penetapan pengundangan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-
21	Berkoodinasi dengan Ditjen PP terkait tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum										Dokumen dan Surat pendukung yang dibutuhkan untuk pengajuan pengundangan peraturan	3 Hari	Dokumen proses tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	-



No	Kegiatan	PELAKSANA									Mutu Baku			Keterangan
		KARO RENO	SES UKE I	KABAG ORTALA & TU	SEKJEN	MENTERI HUKUM	KEMEN PANRB	BIRO HUKERMA	DITJEN PP	JF / PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
22	Menetapkan pengundangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum					SELESAI					Dokumen proses tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	1 Minggu	Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-